

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan yang mencapai 3,25 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 63% wilayah Indonesia yang terdiri dari perairan. Sehingga di Laut Indonesia sendiri memiliki potensi yang cukup besar dalam memproduksi dan mengembang Sumber Daya Alam yang dimilikinya. Wilayah pesisir merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi di Indonesia. Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok, yakni: (1) Sumber daya dapat pulih seperti perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. (2) sumber daya tak dapat pulih seperti minyak bumi, gas, dan hasil tambang lainnya. (3) jasa-jasa lingkungan seperti pariwisata dan olahraga.

Untuk memanfaatkan potensi di wilayah pesisir tersebut, maka pembangunan infrastruktur perlu untuk dilakukan. Karena pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Untuk pembangunan sendiri memiliki definisi suatu proses perubahan dalam meningkatkan taraf hidup manusia yang tidak terlepas dari segala aktivitas pemanfaatan sumber daya alamnya. Pembangunan juga merupakan seperangkat usaha yang telah direncanakan atau telah diarahkan agar dapat menghasilkan sesuatu yang

dapat dimanfaatkan dalam memenuhi suatu kebutuhan atau juga hal tersebut dilaksanakan agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan Tujuan Negara Republik Indonesia yang sudah tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yakni pada poin: "... untuk memajukan kesejahteraan umum ...". Agar Tujuan tersebut dapat tercapai maka Pembangunan Infrastruktur disini perlu untuk dilakukan, karena Infrastruktur sendiri memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan kegiatan social lainnya.

Dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur ini tentu harus berlandaskan dengan adanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan suatu pilihan tertentu atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik ini sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu, jika dilihat dari hierarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengenai Otonomi Daerah yang mana hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat suatu kebijakan yang mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan taraf sosial dan perekonomian masyarakatnya. Salah satunya yakni membuat Kebijakan dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir pantai atau melakukan Reklamasi di daerah yang mana daerah reklamasi tersebut dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata yang baru.

Menurut **Perencanaan Kota** (dalam Skripsi **Agus Ade Irawan, 2018:3** yang berjudul **Dampak Ekspansi Reklamasi Terhadap Menurunnya Pendapatan Dan Penghasilan Nelayan Di Pesisir Pantai (Studi Kasus Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba)**): Reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan membuat kanal-kanal, membuat tanggul/ polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan.

Reklamasi juga dapat di definisikan sebagai suatu aktivitas penimbunan di dalam suatu areal dengan skala yang relatif luas hingga sangat luasnya di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan

rencana tertentu. Pembangunan kawasan komersial atau reklamasi ini tentu akan memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Karena asumsi yang sering digunakan disini yakni, semakin banyaknya kawasan komersial yang dibangun maka hal tersebut akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Reklamasi juga akan menjadi jalan alternative dalam mengembangkan suatu wilayah yang melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah Daerah, Swasta, dan juga Masyarakat. Reklamasi akan memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka menyediakan lahan untuk keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, mengembangkan wisata bahari, membangun jalan, dan lain-lainnya seperti yang dilakukan oleh Kota Tanjungpinang yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 yang dilakukan di Tepi Laut yang berdekatan dengan Pelabuhan Pantai Barat Tanjungpinang (dari Pelabuhan Sri Bintan Pura ke Lantamal). Pembangunan Infrastruktur ini dilakukan karena kawasan pesisir Pantai Barat di Kota Tanjungpinang dapat memberikan potensi dalam memberikan tambahan sektor pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang apabila Pembangunan Infrastruktur ini dilakukan.

Seperti yang dikatakan oleh **Grigg**, fasilitas fisik dalam infrastruktur yakni:

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi

2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali
3. Fasilitas manajemen limbah padat
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara.  
Termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol
5. Sistem transit publik
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi
7. Fasilitas pengolahan gas alam
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air
10. Bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, fasilitas pemadam kebakaran
11. Fasilitas perumahan
12. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.

Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 ini selain bertujuan dalam membangun jalan juga ditujukan untuk membangun taman, bangunan-bangunan dan fasilitas publik lainnya yang nantinya akan dijadikan sebagai Destinasi Wisata baru yang ada di Kota Tanjungpinang. Selain itu, bangunan hasil dari pembangunan infrastruktur ini yakni bangunan gedung yang diberi nama “Gedung Gonggong” yang terletak di Taman Laman Boenda yang juga merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur yang menjadikan Bangunan Gedung Gonggong ini sebagai Ikon Kota Tanjungpinang.

**Gambar 1.1 Gedung Gonggong**



*Sumber : Dokumen Pribadi 2022*

Menurut **Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020** Kawasan Reklamasi merupakan kawasan dimana ada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara penimbunan tanah, pengeringan lahan atau drainase. Kawasan reklamasi meliputi : a. Pesisir pemukiman pelantar dari pelabuhan Penyengat sampai Kampung Bulang; b. Pelabuhan Pantai Barat Tanjungpinang (dari Pelabuhan Sri Bintang Pura ke Lantamal); c. Pantai Pinang Marina, Tanjung Unggat; d. Tanjung Kiang ke Pantai Impian; e. Kampung haji Sungai Serai; f. Tanjung Sebauk ke Kampung Madong; g. Senggarang besar; dan h. Pulau Penyengat. Yang mana dalam Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 di Tanjungpinang ini dibangun di dekat Pantai Barat Tanjungpinang.

Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 di Tanjungpinang selain sudah menghasilkan sebuah gedung yang menjadi Ikon Kota Tanjungpinang, juga sudah menghasilkan beberapa taman-taman kecil disekitarnya dan fasilitas publik seperti: tempat olahraga; taman bermain anak-anak; jalan; lapangan terbuka; dan lain-lainnya.

### Gambar 1.2

**(1) Tempat Olahraga, (2) Taman Bermain anak-anak, (3) Toilet Umum, (4) Jalan, (5) Lapangan Terbuka**



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

*Sumber : Dokumen Pribadi 2022*

Dilihat dari manfaat yang telah disebutkan tadi, Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 yang dibangun di Tepi Pantai Barat Tanjungpinang ini sudah tentu bertujuan akan digunakan sebagai objek wisata yang dimana dengan adanya Pembangunan Infrastruktur ini dapat meningkatkan minat keinginan tauan orang-orang yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi semakin meningkat. Dengan begitu, Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 ini dibangun agar dapat menambah objek wisata yang ada di Tanjungpinang serta Provinsi Kepulauan Riau ini dapat semakin di kenal oleh orang-orang banyak.

Tak jarang dikarenakan adanya Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 ini berpotensi memberikan suatu permasalahan atau dampak positif maupun negatif bagi wilayah tersebut. Untuk dampak positifnya sendiri yakni, dengan adanya lahan baru di kawasan Tepi Laut, kawasan tersebut dapat membangun sebuah tempat pariwisata yang diberi nama dengan Taman “Laman Boenda” yang mana di dalam pembangunan infrastruktur tersebut juga membangun bangunan Gedung Gonggong, Jalan, Lapangan terbuka yakni Tugu Sirih, dan lain-lainnya yang hal tersebut memberikan kontribusi dalam menambah pendapatan asli daerah dan lahan bagi pedagang kaki lima untuk mendagangkan dagangannya karena dengan adanya beberapa fasilitas publik tersebut akan memberikan minat pengunjung untuk datang ke Laman Boenda dan sekitarnya dimana hal tersebut membuat jumlah



pengunjung menjadi meningkat yang awalnya hanya sedikit pengunjung yang datang, kini daerah Laman Boenda dan sekitarnya kini menjadi ramai pengunjung dikarenakan fasilitas yang ada Laman Boenda dan sekitarnya selain memberikan minat akan keingintauannya mengenai Gedung Gonggong, juga terdapat fasilitas seperti taman bermain anak-anak dan sarana untuk berolahraga dimana hal tersebut sangat memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat banyak bagi masyarakat Kota Tanjungpinang. Selain itu juga, pembangunan infrastruktur tersebut dapat menjadi tambahan bagi destinasi wisata di Kota Tanjungpinang.

Sedangkan untuk dampak negatifnya, semakin terbatasnya akses masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan Sondong atau Nelayan yang menangkap udang disekitaran wilayah pesisir Tepi Laut untuk menangkap udang. Hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sosial ekonominya dan menjadikan Nelayan Sondong harus mengubah profesinya untuk mencukupi kebutuhan ekonominya dengan cara yang lain. Itulah mengapa dalam melakukan pembangunan infrastruktur tersebut harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan reklamasi.

Pembangunan infrastruktur tersebut juga memberikan dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya hingga habitat ruang perairan masyarakat sebelum dilakukan reklamasi. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan cenderung memberikan ancaman dalam kapasitas berkelanjutan dari ekosistem tersebut, seperti

pencemaran di perairan, degradasi fisik habitat pesisir utama, abrasi pantai, dan lain-lainnya.

**Tabel 1.1**

**Sebelum dan Sesudah Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12**

	Sebelum	Sesudah
Fisik	Yang dulunya hanya kawasan pesisir tepi pantai biasa	Kini terdapat beberapa kawasan seperti Tugu sirih, jalan raya dipesisir Pembangunan Infrastruktur, dll)
	Masih terdapat kawasan pesisir pantai di Kawasan Tepi Laut	Hilangnya kawasan pesisir pantai di Kawasan Tepi Laut
	Kota Tanjungpinang belum memiliki ikon yang melambangkan Kota Tanjungpinang	Adanya Gedung Gonggong yang menjadikan Ikon bagi Kota Tanjungpinang
	Kawasan pantai pesisir tepi laut masih terjaga dengan baik	Terjadinya pencemaran pada perairan dikawasan sekitar pesisir pantai tepi laut
	Dahulu tidak mengalami abrasi pantai	Kini terjadi abrasi pantai setelah pembangunan infrastruktur
Non Fisik	Masih mudahnya menjumpai Nelayan Penyondong Udang	Sulitnya menemukan Nelayan Penyondong Udang
	Tidak begitu banyak pengunjung disekitar area Tepi Laut	Ramainya Pengunjung yang datang ke sekitaran Taman Laman Boenda

	Kurangnya terjadi kemacetan ketika malam hari	Seringnya terjadi kemacetan ketika malam hari
	Tidak begitu banyak Pedagang Kaki Lima disekitar area Tepi Laut	Ramainya Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitaran Taman Laman Boenda
	Pendapatan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar tepi laut terbilang stabil	Pendapatan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar Laman Boenda dan sekitarnya kian meningka

*Sumber : Diolah oleh Peneliti 2022*

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan ke dalam laporan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENATAAN KAWASAN PESISIR PANTAI GURINDAM 12 TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR LAMAN BOENDA KOTA TANJUNGPINANG”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Dengan Adanya Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Laman Boenda Kota Tanjungpinang?

2. Bagaimana Presepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Ini?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Dengan Adanya Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Laman Boenda Kota Tanjungpinang.
2. Untuk Mengetahui Presepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Pembangunan Infrastruktur Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam hal ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam keperluan teoritis. Terutama bagi kalangan akademis dan juga dapat berguna bagi kepentingan yang sifatnya praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan perbandingan antara teori yang sudah dipelajari dengan praktik yang telah diterapkan berdasarkan hasil data yang diperoleh dari beberapa penelitian dan hasil observasi di lapangan.

2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada semua pihak yang terkait mengenai pengaruh dari pembangunan infrastruktur.